

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai Balai Besar siap melaksanakan naturalisasi sungai bila luas lahannya memadai.

Inge Klara Safitri

inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA—Pemerintah DKI Jakarta akan menggenjot lagi pembebasan lahan untuk penataan sejumlah sungai di Ibu Kota. Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan pengerukan sungai yang sempat berhenti selama dua tahun terakhir pun segera dimulai lagi. Tujuannya, untuk mengendalikan banjir saat musim hujan nanti.

“Berdasarkan kegiatan strategis daerah, naturalisasi akan menyentuh waduk terlebih dulu. Untuk sungai masih pendataan,” ujar Juaini, Selasa lalu.

Sembari menggarap proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, menurut Juaini, Dinas Sumber Daya Air juga terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) serta Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sebelumnya, Juaini mengatakan, program pelebaran dan penataan (normalisasi) Sungai Ciliwung sempat terhenti karena terganjal masalah pembebasan lahan. Hingga 2017, dari target normalisasi sungai sepanjang 33 kilometer, pengerjaan baru terealisasi 16 kilometer.

Pengerjaan normalisasi Ciliwung merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dan BBWSCC. Adapun pembebasan lahan di sekitar bantaran sungai yang hendak dinormalisasi merupakan tugas pemerintah DKI. Karena pembebasan lahan tersendat, pemerintah pusat tak mengalokasikan dana untuk normalisasi Sungai Ciliwung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Tahun ini, menurut Juaini, pemerintah DKI akan membebaskan lahan di sekitar sungai dan waduk yang akan ditata.

Dana pengadaan lahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 dialokasikan untuk penataan sungai dan saluran air sebesar Rp 500 miliar. Adapun dana pengadaan lahan untuk penataan waduk, situ, dan embung sebesar Rp 350 miliar. Targetnya, akhir tahun ini, pembebasan lahan itu rampung. “Karena kemarin sempat dua kali ganti plt (pelaksana tugas kepala dinas), jadi terhambat,” ujar dia.

Tak hanya terhambat masalah pembebasan lahan, program penataan sungai di Ibu Kota juga tersendat karena perbedaan konsep yang diusung pemerintah pusat dan pemerintah DKI. Sejak masa kampanye pemilihan gubernur pada 2017, Anies Baswedan mengusulkan konsep naturalisasi alias penataan sungai secara alamiah. Berbeda dengan konsep normalisasi yang mengandalkan penurapan pinggir sungai dengan beton, naturalisasi versi

Anies mengusulkan pembuatan tanggul alamiah dari batu atau tanah.

Kementerian PUPR sempat menyatakan kebingungan atas gagasan Anies tersebut. Dalam pandangan Kementerian PUPR, program naturalisasi memerlukan tanah yang lebih luas ketimbang normalisasi. Padahal, lahan di pinggiran sungai di Ibu Kota umumnya sangat sempit karena sudah dipenuhi bangunan.

Kepala BBWSCC Bambang Hidayat mengatakan saat ini pemerintah pusat tak mempermasalahkan lagi konsep mana yang akan dipilih pemerintah DKI. Sebab, tujuan normalisasi ataupun naturalisasi sama-sama menyiapkan kapasitas sungai agar bisa menampung debit banjir yang datang dari hulu. “Dua-duanya visinya sama,” kata Bambang.

Bila pemerintah DKI konsisten mengusung metode naturalisasi, menurut Bambang, konsekuensinya lahan yang harus dibebaskan lebih luas lagi. Pemerintah DKI harus menyediakan lahan selebar 80–90 meter dari bibir sungai. Jika lebar lahan itu terpenuhi, kata Bambang, BBWSCC bisa saja melakukan naturalisasi seperti yang dikehendaki Anies. ●

Bulan :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DKI Segera Bebaskan Lahan untuk Penataan Sungai

Proyek Perdana Naturalisasi

PEMERINTAH DKI Jakarta telah membangun sejumlah waduk untuk mengendalikan banjir di Ibu Kota. Waduk itu di antaranya adalah Waduk Rambutan 1 dan 2 yang berfungsi mengantisipasi luapan Kali Cipinang. Gubernur Anies Baswedan telah menetapkan waduk tersebut sebagai proyek rintisan program naturalisasi.

Waduk Rambutan

- » Lokasi: RW 06 dan RW 04, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
- » Luas: 15 hektare
- » Kedalaman: 6 meter
- » Pembangunan fisik: 75 persen
- » Pemenang tender proyek naturalisasi: PT Jhuda Citraguna
- » Pagu anggaran: Rp 20 miliar
- » Mulai pengerjaan konstruksi: Agustus 2019
- » Target rampung: akhir 2019

Rencana desain konstruksi:

- » *Finishing* waduk tanpa beton
- » Membangun fasilitas taman
- » Membangun fasilitas *jogging track*

